

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Singapura terkait tindak pidana judi *online*. Persamaan tersebut terletak pada kedua negara sudah memiliki pengaturan hukum terkait tindak pidana judi *online*, meskipun Singapura masih melegalkan beberapa aktivitas judi *online* yang telah memiliki izin resmi dari otoritas Singapura yang berwenang. Lebih lanjut, perbedaan antara Indonesia dan Singapura terletak pada aturan hukum yang mengatur terkait tindak pidana judi *online*, Indonesia memiliki beberapa peraturan terkait tindak pidana judi, akan tetapi terhadap tindak pidana judi *online* secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun dalam peraturan tersebut tindak pidana judi *online* masih digabung dengan tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik lainnya. Singapura telah memiliki aturan hukum terkait judi *online* yang terpisah dengan aturan hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh Nomor 34 Tahun 2014, Undang-Undang Kontrol Perjudian Nomor 15 Tahun 2022 dan *Gambling Regulatory Authority of Singapore Act 2022*.

Lebih lanjut, dalam hukum Singapura terkait judi *online* telah dibedakan bentuk perbuatan tindak pidana judi *online* sesuai dengan subyek hukum yang melanggar, sedangkan di Indonesia terhadap para pelaku tindak pidana judi *online* baik itu bandar, pemain, maupun pengiklan masih dikenai pasal yang sama yaitu Pasal 27 ayat (2). Sejalan dengan hal tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan atas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku judi *online* antara Indonesia dan Singapura. Persamaannya terletak pada jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda kepada para pelaku judi *online*, sedangkan perbedaannya terletak pada besar kecilnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan pembaharuan hukum mengingat tindak pidana judi *online* yang terus berkembang. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas makna terkait judi *online* termasuk di dalamnya jenis-jenis judi *online*.

2. Indonesia dapat mengambil hal positif yang diatur dalam hukum pidana Singapura khususnya mengenai tindak pidana judi *online*. Terlebih Singapura telah memiliki aturan hukum terkait judi *online* yang terpisah dengan aturan hukum lainnya yang tentunya dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labbib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, dkk., 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Irfan, dkk., 2013, *Penanggulangan Cyber Crime*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satya Arinanto, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, DEEPUBLISH, Yogyakarta.

B. Hasil Penelitian

- Ahmad Fauzan, 2024, Analisis Tindak Pidana Judi Online (Studi Komparatif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah, Skripsi, Jurusan Pidana Politik Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Muhammad Fajar Al Islami, 2022, Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi Online di Era Digital, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ratih Septria Putri, 2024, Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Singapore's Remote Gambling Act 2014;

Singapore's Gambling Control Act 2022;

Gambling Regulatory Authority of Singapore Act 2022.

D. Jurnal Hukum

Imelda Sonia Rumbay, dkk., 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5.

Selviana Teras Widy Rahayu, 2022, Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Sigit Kamseno, dkk., 2024, Perbandingan Hukum Pidana tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. I, No.4.

E. Internet

KBBI Daring, "Definisi Judi", <http://kbbi.web.id/judi>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

Merdeka.com, “Darurat Judi Online, Indonesia Peringkat Pertama Jumlah Pemain Judi Terbanyak di Dunia”, <http://merdeka.com/uang/darurat-judi-online-indonesia-peringkat-pertama-jumlah-pemain-judi-terbanyak-di-dunia-158491-mvk.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

